



KEMENTERIAN KEUANGAN

# LAPORAN KINERJA KPKNL TANGERANG I



2023

## PENGANTAR

Pertanggungjawaban pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I selama tahun 2023 dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan RB Nomor 53/2014).

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari hasil setiap kegiatan yang dilakukan, yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang diharapkan atau mendeteksi kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan setiap tugas.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan KPKNL Tangerang I selalu dilandaskan pada visi yang telah ditetapkan yaitu : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL”.

Menjadi yang terbaik adalah harapan yang selalu terus akan diusahakan untuk dicapai yang tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan dan harapan yang ada dan terjadi pada masyarakat.

Perwujudan untuk menjadi yang terbaik dalam Tahun 2023 dilaporkan dalam Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2023 guna memberikan pertanggungjawaban atas visi dan misi yang telah diemban.

Tangerang, 31 Januari 2024  
Kepala KPKNL Tangerang I



Ditandatangani secara elektronik



Ririen Fransiska

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian Kinerja KPKNL Tangerang I dalam mengelola kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang disajikan melalui Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2023. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I yang disusun pada tahun 2023 berisikan capaian kinerja selama periode tahun 2023, sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu :

**“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.**

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai.

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2023 menyajikan capaian dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama selama periode 2023.

Pencapaian Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2023 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan. Evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

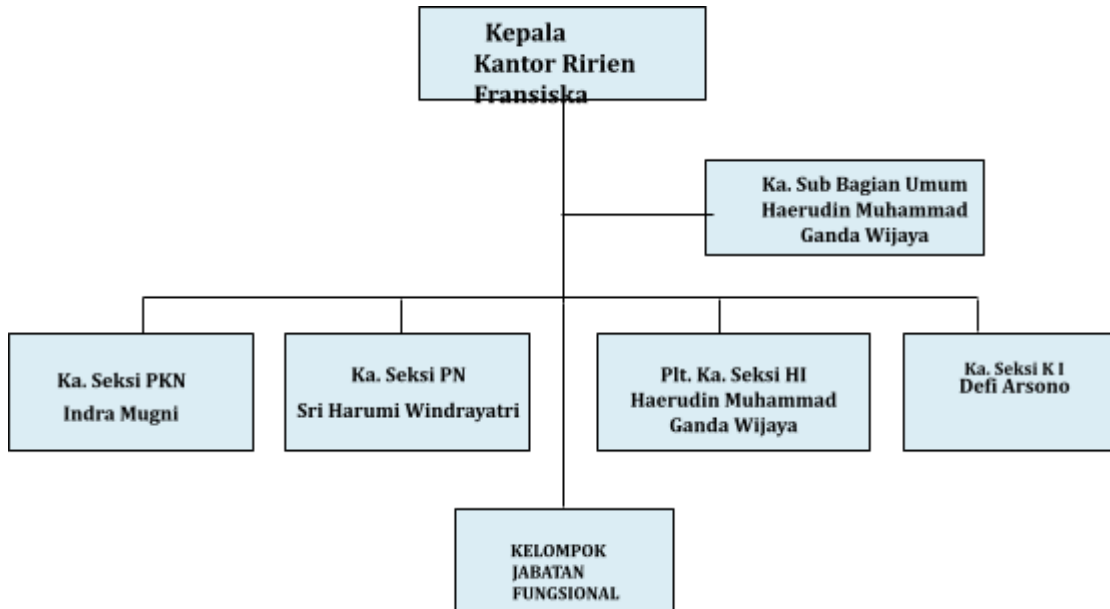
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I adalah unit operasional yang merupakan Instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Tangerang I berkedudukan di Kota Tangerang, dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang merupakan fungsi operasional dari Instansi Vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten.

KPKNL Tangerang I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Struktur organisasi KPKNL terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Piutang Negara
4. Seksi Hukum dan Informasi
5. Seksi Kepatuhan Internal
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang**



**Kekuatan Sebagai Sumber Daya Manusia yang Ada**

**1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai KPKNL Tangerang I per 31 Desember 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

I. Berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	0	0	0
2.	II	0	1	1
3.	III	13	12	25
4.	IV	3	1	4
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>

I. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon			
			II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	
2	Subbagian Umum	6	-	-	1	5
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	3	-	-	1	2
5	Seksi Piutang Negara	3	-	-	1	2
7	Seksi Hukum dan Informasi	5	-	-	1	4
8	Seksi Kepatuhan Internal	3	-	-	1	2

II. Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Khusus

No	Bendahara	Pelelang	Penilai
1.	2	4	3

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Tangerang I menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang

negara dan lelang;

- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Tangerang I sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan fungsi operasional pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang adalah melakukan tugas-tugas tersebut secara optimal. Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang didasarkan pada visi yang telah ditetapkan dan hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang I sejalan dengan Visi DJKN, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai.

Tindakan dan langkah serta hasil yang dicapai merupakan tolok ukur keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau sesuai mandat yang diemban sehingga setiap langkah yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban atas setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun

2023.

## B. Peran Strategis KPKNL Tangerang I

Seperti telah disebutkan di atas bahwa KPKNL sebagai lembaga yang melayani penilaian, pengelolaan kekayaan negara, serta pengurusan piutang negara dan lelang, senantiasa mengupayakan tugas pelayanan tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan tugasnya tersebut dapat memberikan hasil pada peningkatan pendapatan dari sektor penerimaan bukan pajak (PNBP) melalui pelelangan maupun pelunasan piutang negara, serta pemanfaatan kekayaan negara yang *idle* pada Kementerian/Lembaga.

Pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dapat menghasilkan penerimaan negara yang tentunya akan sangat strategis artinya bagi pembiayaan pembangunan serta memberikan layanan pada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu setiap pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Tangerang I membawa peran strategis tidak hanya bagi kepentingan pemerintah tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang dilayani.

Kepentingan-kepentingan tersebut terwakili pada instansi-instansi pengguna jasa KPKNL yang di antaranya adalah Para Penyerah Piutang yaitu Lembaga-lembaga Perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung milik pemerintah serta lembaga non perbankan seperti instansi pemerintah lainnya serta masyarakat secara langsung yang memerlukan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Peran KPKNL tersebut tentu saja harus didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Tangerang I merupakan modal dan landasan yang penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi.

### **C. Sistematika Pelaporan**

Laporan Kinerja Tahunan 2023 ini kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja.

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

**BAB IV          PENUTUP**

Berisi simpulan umum tentang capaian kinerja tahun 2023, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja.

**LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Pelaporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada perencanaan sistematis sehingga pelaporan kinerja merupakan hasil evaluasi selama pelaksanaan rencana tersebut. Perencanaan sistematis yang berkelanjutan merupakan perencanaan strategik dari langkah-langkah yang akan ditempuh oleh instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik yang disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul. Rencana strategik KPKNL Tangerang I terwujud dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mengantisipasi keadaan saat ini dan perkembangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Visi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam perencanaan strategik yang akan dicapai adalah : **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."** Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Pada visi tersebut, terminologi **Pengelola Kekayaan Negara** merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

**Profesional** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

**Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan

negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Tangerang I menetapkan Misi yang merupakan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang terdiri dari :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan misi yang telah dinyatakan untuk mewujudkan visi KPKNL Tangerang I maka perlu diperhitungkan secara cermat segala potensi, peluang dan kendala yang dimiliki dan akan dihadapi yang melingkupi lingkungan kerja KPKNL Tangerang I. Hasil perhitungan secara cermat dan analisis atas faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan atas kondisi internal dan eksternal yang melingkupi lingkungan kerja KPKNL Tangerang I. Analisis atas kondisi internal, eksternal dan strategi yang berupa potensi, peluang dan kendala dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Strengths**

- a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai
- b. Struktur organisasi yang meningkatkan efisiensi pengurusan piutang negara dan lelang

### **2. Weakness**

- a. Kuantitas sumber daya manusia yang belum sejalan dengan komposisi kebutuhan jabatan untuk pelaksanaan tugas
- b. Peraturan di bidang pengelolaan Kekayaan negara, Piutang Negara dan Lelang yang kurang memadai

### **3. Opportunities**

- a. Wilayah Kerja yang potensial

- b. Potensi lelang dan utilisasi BMN yang semakin besar

- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyikapi kekurangan sumber daya

#### **4. Threats**

Tidak terlayannya wilayah kerja secara optimal karena kurang optimalnya sumber daya

Dari hasil analisis tersebut maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan menentukan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Ketersediaan dan kemampuan personil**

Faktor dominan berupa ketersediaan dan kemampuan personil secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

###### **a. Ketersediaan personil**

Ketersediaan personil merupakan jumlah ideal pegawai yang dapat melaksanakan tugas yang harus dikerjakan. Saat ini KPKNL Tangerang I memiliki 30 (tiga puluh) orang personil yang siap untuk mengerjakan tugas-tugas operasional maupun tugas-tugas administratif yang akan mendukung pelaksanaan tugas operasional.

Dari 30 (tiga puluh) orang tersebut terdapat 4 (empat) orang pegawai yang mengemban jabatan fungsional Pelelang, 3 (tiga) orang penilai pemerintah dan 1 (satu) orang fungsional Pranata Keuangan APBN .

Jumlah pegawai tersebut secara umum masih terdapat ketidakseimbangan dengan komposisi yang diperlukan, terutama dalam tugas pengurusan Piutang Negara dan Pelaksanaan Lelang.

##### **2. Sarana dan prasarana yang sangat menunjang**

Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Tangerang I merupakan modal dan landasan yang penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Sarana dan prasarana penting yang secara langsung menunjang pelaksanaan tugas operasional KPKNL Tangerang I terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

**a. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan administratif**

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan administratif terdiri dari perangkat-perangkat komputer yang cukup tersedia dan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat digunakan untuk menunjang pengolahan data administratif dengan memadai. Perangkat-perangkat tersebut tersebar di masing-masing seksi sesuai dengan beban kerja serta kebutuhan masing-masing seksi. Selain itu keberadaan gedung yang representatif dengan ruang penyimpanan berkas (rumah berkas) yang memadai sangat mendukung kegiatan pengolahan data dan penyimpanan data yang sangat penting untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.

**b. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasional**

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional diwujudkan dalam bentuk tersedianya perangkat-perangkat komputer yang dikhususkan untuk pengolahan data atau penyelesaian produk-produk hukum yang merupakan tugas operasional KPKNL Tangerang I sehingga untuk keperluan dan kebutuhan penunjang kegiatan operasional tidak perlu dikhawatirkan.

**3. Wilayah Kerja**

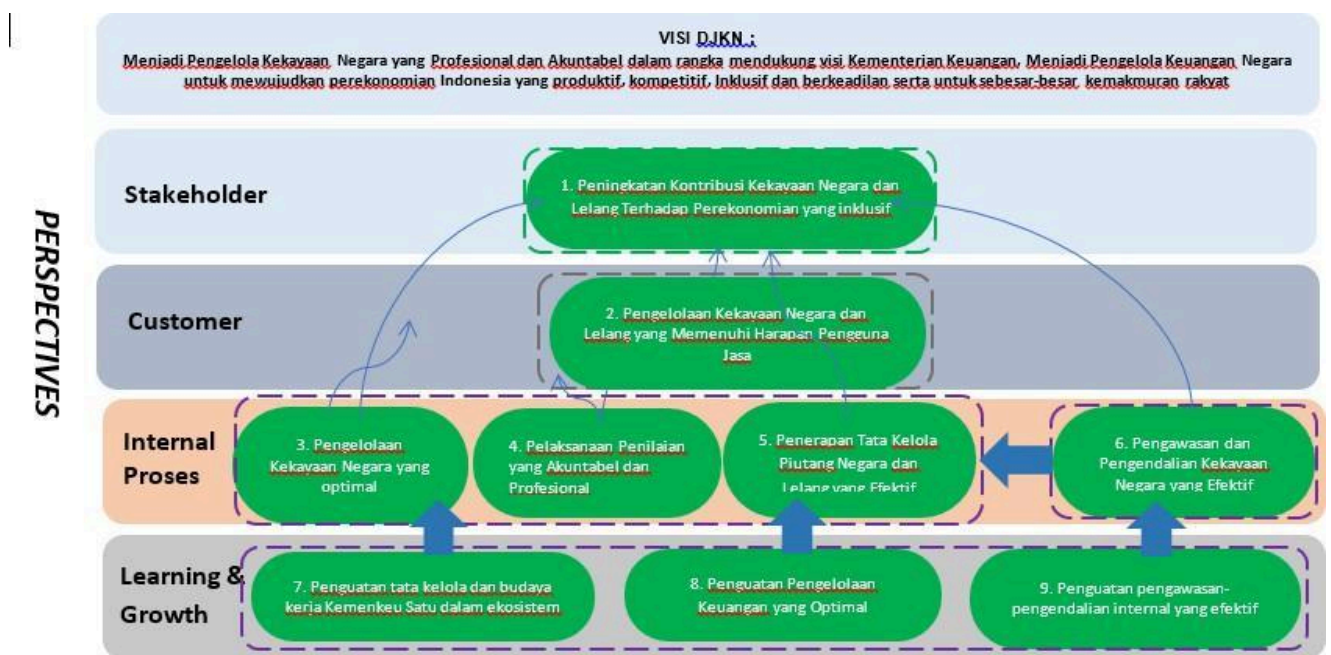
Wilayah kerja KPKNL Tangerang I yaitu meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah tersebut merupakan wilayah kerja yang cukup potensial untuk dikelola. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan kota penyangga Ibu Kota Jakarta sehingga perkembangan wilayahnya sangat pesat. Wilayah kerja yang potensial tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menunjang tercapainya target pencapaian hasil pengurusan serta implementasi dari visi dan misi yang dicanangkan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Sesuai dengan konsep manajemen kinerja yang diterapkan Kementerian Keuangan, maka tujuan strategis dipetakan dalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu

*Three* KPKNL mempunyai empat perspektif sesuai dengan peta strategi yang terdapat

pada Kemenkeu *One* DJKN dan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, *Learning and Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan peta strategi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

**VISI : Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.**



## B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2023 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu *Three* tahun 2023 terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Penetapan Sasaran Strategis**  
**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I**

SASARAN STRATEGIS 1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1a-CP	100% 25.970.203.000	111,93% 29.068.142.888
2. Persentase produktivitas lelang	1b-CP	80%	131,25%
3. Indeks Integritas	1c-CP	89%	89,17%

SASARAN STRATEGIS 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1. Persentase Realisasi Pokok Lelang	2a-CP	100% 310.000.000.000	86,04% 266.710.275.779
2. Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	2b-CP	100% 9.828.566.000	232,47% 22.848.777.779

SASARAN STRATEGIS 3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	3a-CP	68%	92,56%
2. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	3b-CP	100%	128,46%
3. Persentase Penyelesaian BKPN	3c-CP	100%	122,58%

SASARAN STRATEGIS 4 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	4a-CP	25%	0%
2. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	4b-CP	70%	86,25%

SASARAN STRATEGIS 5 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	5a-CP	94%	116,63%
2.	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	5b-CP	86%	115,88%
3.	Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)	5c-CP	100%	117,25%

SASARAN STRATEGIS 6 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	6a-N	86%	100%

SASARAN STRATEGIS 7 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	7a-N	80%	97,74%
2.	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	7b-N	100%	100%

SASARAN STRATEGIS 8 Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	8a-CP	100	99,29
2.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	8b-CP	100%	100%
3.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	8c-CP	15%	0,00%

SASARAN STRATEGIS 9 Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	9b-N	60%	96,63%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2023 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan. Evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL yang dituangkan dalam ikhtisar yang disebut dengan Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengeluaran Kekayaan Negara dan Lelang	Rp.25.970.203.000,00	Rp 37.990.205.752,00	111,93%	111,93%
		a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp12.386.903.000,00	Rp19.288.686.112,00		
		b. PNBP Piutang Negara	Rp57.750.000,00	Rp40.005.850,00		
		c. PNBP Lelang	Rp13.525.600.000,00	Rp9.739.450.926,00		
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	131,25%	131,25%	120,00%
		Indeks Integritas	89%	89,17%	89,17%	100,56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp310.000.000.000,00	Rp266.710.275.779,00	86,04%	86,04%
		a. Pokok Lelang Kelas I	Rp245.000.000.000,00	Rp165.264.275.107,00		

	Pengguna Jasa	b. Pokok Lelang Pegadaian	Rp65.000.000.000,00	Rp80.030.590.400,00		
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	Rp9.828.566.000,00	Rp22.848.777.623,00	232,47%	120,00%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan SBSK	68%	92,56%	92,56%	120,00%
		Persentase Bidang Tanah yang Disertipikatkan	100%	128,46%	128,46%	120,00%
		Persentase Penyelesai Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	31	38	122,58%	120,00%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0%	200,00%	120,00%
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile Efektif dan Efisien	70%	86,25%	86,25%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	116,63%	116,63%	120,00%
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	115,88%	115,88%	120,00%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	56	67	117,25%	117,25%
		a. Evaluasi Kinerja BMN	51	62		

		b. Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	5	5		
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100%	100%	116,28%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80%	97,74%	97,74%	120,00%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	100%	100%	100,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	99,29	99,29%	99,29%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%	100,00%	100,00%
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0,00%	200,00%	1 20,00%
9	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60%	96,63%	96,63%	120,00%
Nilai Kerja Organisasi					114,13%	

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memerlukan evaluasi sebagai analisis terhadap kegiatan yang dilakukan serta pencapaian sasaran dan tingkat kinerja yang diinginkan. Evaluasi terhadap kegiatan serta kinerja yang dihasilkan tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama Kemenkeu Three KPKNL dan pengukuran kinerja kegiatan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 yang berkaitan dengan disertai analisis atas pencapaian kerjanya.

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang I memiliki 9 Sasaran Strategis (SS) Kemenkeu *Three* yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem;
8. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal;
9. Penguatan pengawasan – pengendalian internal yang efektif.

Untuk mencapai 9 (sembilan) SS tersebut, ditetapkan 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three*. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 114,13%, adapun rincian pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu *Three* sebagai berikut:

**SS KPKNL.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif**  
capaian kinerja 3 (tiga) IKU yaitu:

**1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi

pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Untuk tahun 2023, kinerja penerimaan negara berupa PNBP diakui apabila nilai penerimaan telah masuk ke rekening kas negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) berita acara atau surat jawaban atau data pada aplikasi Online Monitoring SPAN dari Kanwil Perbendaharaan/KPPN setempat terkait dengan data penerimaan negara atas mata anggaran penerimaan sebagai rincian di bawah ini atau
- 2) data dari Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) baik yang disetor oleh bendahara penerima KPKNL (untuk PNBP piutang negara dan lelang) maupun SSBP dari satuan kerja yang melakukan pemanfaatan BMN.

Nilai penerimaan negara pengelolaan kekayaan negara terdiri dari tiga komponen yaitu PNBP Pengelolaan BMN dengan target Rp12.386.903.000,00, PNBP Piutang Negara dengan target Rp57.700.000,00 dan PNBP Lelang dengan target Rp13.525.600.000,00. Selama tahun 2023 KPKNL Tangerang I berhasil merealisasikan PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp19.288.686.112,00, PNBP Piutang Negara sebesar Rp40.005.850,00 dan PNBP Lelang sebesar Rp9.739.293.404,00 sehingga realisasi IKU tercapai sebesar 111,93%.

#### **1b-CP Persentase Produktifitas Lelang**

Produktifitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

KPKNL Tangerang I pada tahun 2023 mendapatkan target sebesar 80%, frekuensi lelang terealisasi sebanyak 957 dan yang laku adalah sebanyak 288 sehingga persentase produktifitas lelang sebesar 131,25%.

#### **1c-CP Indeks Integritas**

KPKNL Tangerang I pada tahun 2023 mendapatkan target Indeks Integritas sebesar 89% dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 89,17%

**SS KPKNL.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa capaian kinerja 2 (dua) IKU yaitu:**

### 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang pada KPKNL merupakan pokok lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I / Jabatan Fungsional Pelelang dan pelaksanaan lelang oleh Pegadaian dalam periode tertentu.

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang I diberikan target sebesar Rp310.000.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp266.710.275.779,00 atau sebesar 86,04%.

### 2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2016 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2023) diharapkan turun menjadi 0%.

Pada tahun 2023, target tingkat penurunan *outstanding* piutang negara untuk KPKNL Tangerang I adalah sebesar Rp9.828.566.000,00. Realisasi tingkat penurunan *outstanding* piutang negara sepanjang 2023 sebesar Rp22.848.777.623,00.

**SS KPKNL.3 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal  
capaian kinerja 3 (tiga) IKU yaitu:**

### 3a-CP Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang. Barang milik negara dimaksud merupakan BMN berupa tanah dan/atau bangunan/gedung kantor dan rumah negara/mess yang telah selesai dilakukan pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dibandingkan dengan seluruh jumlah BMN berupa tanah dan/atau bangunan/gedung kantor dan rumah negara/mess pada wilayah kerja KPKNL Tangerang I. Capaian IKU SBSK pada tahun 2023 adalah sebesar 92,56% dari target 68%.

Tantangan dalam pencapaian IKU lebih kepada kendali IKU yang rendah, karena peranan satuan kerja / Kuasa Pengguna Barang dalam penggunaan BMN yang tinggi namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. KPKNL selaku pengelola barang hanya dapat melakukan pendataan melalui formulir SBSK. Diharapkan kedepan IKU ini dapat memberikan rekomendasi dan efek lebih baik dalam penggunaan BMN pada satuan kerja.

### **3b-CP Persentase Bidang Tanah yang Disertifikasi**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama

Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Barang milik negara berupa tanah

harus disertipikatkan atas nama pemerintah ri c.q. Kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Dari target persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan adalah sebesar 123 bidang tanah, KPKNL Tangerang I berhasil melakukan sertifikasi bidang tanah BMN sebesar 158 bidang tanah, sehingga capaian dapat terealisasi sebesar 128,46%.

Tantangan dari pelaksanaan IKU ini yaitu KPKNL Tangerang I hanya sebagai penghubung antara Satuan Kerja yang memiliki BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan atau sertifikatnya belum sesuai ketentuan dengan Kantor Pertanahan, sehingga tingkat kendalinya rendah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain terdapat BMN tanah yang pada saat pelaksanaan diketahui belum free and clear sehingga belum dapat dilaksanakan sertifikasi, sehingga harus mencari target bidang tanah baru untuk disertifikatkan.

### **3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Dari target persentase penyelesaian BKPN adalah sebesar 31 BKPN, KPKNL Tangerang I berhasil melakukan penyelesaian BKPN sebesar 38 BKPN., sehingga capaian dapat terealisasi sebesar 122,58%.

### **SS KPKNL.4 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional capaian kinerja 2 (dua) IKU yaitu:**

#### **4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang I diberikan target sebesar 25%, sementara tingkat deviasi yang diperoleh adalah 0%.

#### **4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien**

Penyelesaian layanan penilaian yang berkualitas adalah serangkaian proses kegiatan dalam melaksanakan penilaian yang diberikan kepada pengguna jasa sehingga mampu menghasilkan laporan penilaian yang memenuhi asas-asas (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Realisasi rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien pada KPKNL Tangerang tercapai 86,25% dari target ditetapkan yaitu sebesar 70%. p

**SS KPKNL.5 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif  
capaian kinerja 3 (tiga) IKU yaitu:**

**5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction**

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 94% dari realisasi frekuensi lelang.

KPKNL Tangerang I pada tahun 2023 capaian persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction yaitu sebesar 116,63%.

**5a-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online**

Permohonan lelang online adalah Permohonan lelang oleh KPKNL yang

memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet.

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan Permohonan lelang secara online, lebih optimal dan transparan.

KPKNL Tangerang I pada tahun 2023 capaian persentase Permohonan lelang online yaitu sebesar 115,88%.

#### **5c-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Dari target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 56, KPKNL Tangerang I berhasil melakukan evaluasi BMN sebesar 67 aset, sehingga capaian dapat terealisasi sebesar 117,25%.

#### **SS KPKNL.6 Pengawasan dan Pengendalian kekayaan Negara yang Efektif** **Capaian kinerja 1 (satu) IKU yaitu:**

#### **6a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara**

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Total capaian Iku adalah sebesar 100%, jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 86%.

### **SS KPKNL.7 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif**

**Capaian kinerja 2 (dua) IKU yaitu:**

#### **7a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Total capaian IKU adalah sebesar 97,74% dari target yang ditetapkan yaitu 80% di tahun 2023.

#### **7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Para pegawai di KPKNL Tangerang I dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) serta kegiatan lain yang pernah diikuti.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) serta kegiatan lain tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, internship/on the job training, workshop, bimbingan teknis, in-house training terkait bidang teknis

Untuk tahun 2023, evaluasi dilakukan untuk pegawai dengan jabatan pejabat eselon IV dan pelaksana

Total capaian Iku adalah sebesar 100%, jumlah ini sesuai dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

**SS KPKNL.8 Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal  
capaian kinerja 3 (tiga) IKU yaitu:**

**8a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Target persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023 adalah 100%, Realisasi KPKNL Tangerang I sebesar 97,4% atau hanya mencapai 97,4%.

**8b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Pada tahun 2023 target dari IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan adalah 100% dan capaian KPKNL Tangerang I atas IKU tersebut adalah 100%

Selain adanya permasalahan dalam pencapaian kinerja terkait Sasaran Strategis Organisasi, KPKNL Tangerang I juga menghadapi beberapa permasalahan/kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi Non Sasaran Strategis, antara lain:

- 1) Pada tahun 2023, pandemi *Covid 19* semakin terkendali dimana pada tanggal 30 Desember 2022 telah diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dicabut oleh Pemerintah. KPKNL Tangerang I sudah menyelenggarakan kegiatan secara tatap muka langsung dengan para *stakeholder* tetap dengan protokol kesehatan.
- 2) Permasalahan/kendala dalam kegiatan hukum dan informasi:  
Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Beberapa keterbatasan pada penggunaan Aplikasi SIBANKUM DJKN yang mengakibatkan data dalam aplikasi berpotensi diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dimana tidak ada menu Otorisasi dan penggantian Username dan password. Disamping itu, perlu disediakan menu koreksi/pembalik pada aplikasi apabila tahap perkara sudah dinyatakan selesai untuk menambah keakuratan penyediaan data;
  - b) Biaya penanganan perkara khususnya untuk pengambilan putusan, daftar banding/kasasi/PK, daftar bukti/leges dirasakan kurang. Kendala ini bertambah dengan sulitnya mempertanggungjawabkan biaya-biaya dimaksud karena pihak pengadilan tidak bersedia mengeluarkan kuitansi resmi;
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian baik itu dalam melaksanakan penilaian barang jaminan dan penilaian BMN masih ditemui beberapa kendala dan masalah yang dapat menghambat dan mengganggu kelancaran tugas. Kendala dan masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas pada seksi Pelayanan Penilaian, antara lain:
  - a) Terbatasnya data pembanding disuatu daerah, sehingga tim penilai mengalami kesulitan memperoleh data pembanding disekitar lokasi objek penilaian;
  - b) Kelengkapan data dari Satker kadang belum lengkap.

### 8c-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Dari target deviasi data PNBP fungsional DJKN sebesar 15%, KPKNL Tangerang I berhasil terealisasi sebesar 0%.

### SS KPKNL.9 Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif capaian kinerja 1 (satu) IKU yaitu:

#### 9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan dan pengendalian yang efektif berfungsi untuk memastikan pencapaian strategis dari pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023 target Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif adalah 60%, KPKNL Tangerang I berhasil mencapai target tersebut dengan capaian sebesar 96,63%.

## C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 KPKNL Tangerang I memperoleh Pagu anggaran sebesar Rp2.208.039.000,00 yang diperuntukan untuk Belanja Barang dan Belanja Modal. Dari jumlah anggaran yang tersedia tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 dapat terserap sebesar 97,4% atau Rp2.150.595.734,00.

Unsur yang diukur untuk perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah Capaian IKPA dengan bobot 50% serta Capaian Smart DJA dengan bobot 50%.

- a. IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- b. Smart atau Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang I melakukan penyerapan anggaran yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan baik Belanja Operasional maupun Belanja Non Operasional. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,29%.

#### **D. Kinerja Lainnya**

Tahun 2023 masih dengan situasi Pandemi *Covid 19* yang semakin membaik, menjadi tahun yang penuh tantangan bagi KPKNL Tangerang I, baik secara target kinerja maupun kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi yang harus diikuti oleh KPKNL Tangerang I. Setelah di tahun 2022 KPKNL Tangerang I berhasil mempertahankan Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana ketika itu di tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap keberlangsungan Kantor berpredikat WBBM oleh tim Penilai dari Kementerian PANRB dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Hasil dari evaluasi tersebut menyatakan bahwa KPKNL Tangerang I masih bertahan sebagai Kantor berpredikat WBBM.

## BAB IV PENUTUP

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang I tahun 2023 ditetapkan sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL yang terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan evaluasi kinerja, rata-rata tingkat pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I pada tahun 2023 sebesar 114,13%, hal ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2023 secara rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan. Walaupun secara keseluruhan telah melampaui target namun masih terdapat pencapaian sasaran maupun indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu persentase realisasi pokok lelang dan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Dalam pencapaian kinerja tahun 2023, KPKNL Tangerang I menghadapi berbagai kendala diantaranya:

1. Banyaknya potensi gugatan/tuntutan atas pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang;
2. Kurangnya kesadaran satker untuk menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian BMN tepat waktu;
3. Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan minimal sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan belum optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dan kondisi/permasalahan yang terjadi, seluruh personil KPKNL Tangerang I bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan optimal.

Hal-hal yang akan dilakukan KPKNL Tangerang I dalam rangka pencapaian target 2024 secara optimal sehingga menghasilkan capaian yang lebih baik adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
2. Melaksanakan penggalan potensi utilisasi kekayaan negara, piutang negara dan lelang;

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mengikutsertakan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat/pelatihan/workshop yang diselenggarakan internal atau eksternal DJKN;
4. Penatausahaan pengurusan piutang dan lelang negara, serta Barang Milik Negara dengan sistem komputerisasi yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan 2023 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang dibebankan kepada KPKNL Tangerang I pada tahun anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2023 ini adalah yang kelima kali sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangsempurnaan, kedepannya segala kekurangsempurnaan itu akan kami lakukan perbaikan.

**TERIMA KASIH**